

DAFTAR PUSTAKA

- Baehr, PeterR. 1998. *"Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri."* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *"Dasar-dasar Ilmu Politik."* Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Fachruddin, Fuad. 2006. *"Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama."* Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Huda, Ni'matul. 2014. *"Ilmu Negara"*, Jakarta : Raja Grafindo,
- ICJR. 2012. *"Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik."* Institute for Criminal Justice Reform
- Jatmiko, Bayu Dwiwiddy. 2018. *"Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan Uud 1945"* Jurnal Panorama Hukum: 3(2).
- Kansil, C.S.T. 1986. *"Dasar-dasar Ilmu Politik."* Yogyakarta: UNY Press.
- Kasim, Ihdhal, (2001). *"Resume Buku: Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan (Buku 1)."* ELSAM.
- Khanif, Al. 2010. *"Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia."* Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Mantovani, Syahrir, Andi yakub, Ariana. "UPAYA KPU KABUPATEN BULUKUMBA DALAM MELINDUNGI HAK PILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19" Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol 6, No 11. 2021
- Manfred, Nowak. 2003. *"Introduction To The International Human Rights Regime."* Martinus Nijhoff ; Publishers, Leiden Boston.
- Mas'oed, Mochtar. 2003. *"Negara, Kapital dan Demokrasi."* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. *"Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi,"* Yogyakarta: Gama Media.
- Moeloeng, Lexy. 2006. *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nindito, Stefanus 2005 *"Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas"* Jurnal Ilmu Komunikasi. VOLUME 2, NOMOR 1.

- Prihatmoko, J. Joko. 2003. *"Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi."* Semarang: LP2I.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. *"Penelitian Kualitatif."* Jurnal Equilibrium, Volume 5 No 9.
- Rover, C.de. 2000. *"To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakkan HAM)."* Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Sa'duddin (Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera). *"Pengaturan Hak asasi politik Warga Negara."* (artikel) (<http://www.dakta.com>. Acces 6 Januari 2021.)
- Sabine, George. 1937. *"A History of Political Theory"*. London: London Press.
- Sofyan, Yayan. 2010 Makalah: *"Memahami Substansi Hak Azasi Manusia: Kajian Filosofis, Sosiologis Dan Agama."* Dalam Acara Perjamuan Ilmiah Tentang *"Membangun Komitmen Dan Kebersamaan Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia"* (Makalah) Yogyakarta: Pusham UII/NCHR University of Oslo Norway.
- Sri Hastuti P. 2004 *"Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu."* JURNAL HUKUM. NO. 25 VOL 11
- Sugiyono. 2015. *"Memahami Penelitian Kualitatif."* Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2017. *"Metodologi Penelitian Pendidikan."* Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sulistiyowati, Dyahwanti, Muhammad, Sukri, Ariana, 2021. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Melindungi Hak Pilih Warga di Tengah Pandemi COVID-19. Jurnal Politik Profetik, Vol. 9 No. 2. hal. 298-310.
- Sulisworo, Try Dwi. 2012. *"Bahan Ajar (Demokrasi)"*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- The Institute for Criminal Justice Reform. *"Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik"* (Artikel) (<http://icjr.or.id>. Acces 10 Januari 2021.)
- Wardani, Kunthi Dyah. 2007. *"Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia."* Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2005. *"Konstitusionalisme Dan Hak-Hak Asasi Manusia, Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."* Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA

Vol. 20, No. 1: Human Rights Law Studies Fac. Of Law Airlangga University.

Yakub. Andi, Syahrir Mantopani, Novi Budiman. 2022. *“Upaya Menjamin Hak Pilih Masyarakat melalui Tahapan Coklit pada Pilkada Bulukumba 2020”*. Jurnal Politik And Humanism

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Tentang Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid19).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

LAMPIRAN

- Surat izin Penelitian pemerintah Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 28957/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Walikota Makassar
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
3. Kepala Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar
di
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar Nomor : 2580/UN4.8.1/PT.01.01/2022 tanggal 11 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ARFANDIA CENNE
Nomor Pokok : E052191020
Program Studi : Ilmu Politik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" ANALISA PROBLEM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM MELINDUNGI HAK PILIH MASYARAKAT "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 Maret s/d 28 Mei 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Ptt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar
2. Peringkat

SMK/PPTSP 3043-2022



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



- Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara Awal Komisioner Perencanaan dan data KPU Kota Makassar Romy Harminto



Gambar 2 Pengambilan data Awal di KPU Kota Makassar



Gambar 3 Wawancara dan pengambilan data Adhock Kecamatan (PPK)



Gambar 4 Wawancara Bersama lembaga Adhock PPK dan PPS KPU Kota Makassar



Gambar 5 Wawancara Masyarakat yang tidak terdata oleh PPDP pada tahapan Coklit



Gambar 6 Wawancara Penelitian Bersama Komisioner Kota Makassar Bidang Perencanaan dan Data Romy Harminto

